

EFEKTIVITAS PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR

Oleh :

Muhammad Farhan Abdillah¹⁾, Arif Nugroho²⁾

Farhanabdillah364@gmail.com¹⁾ arif.nugroho@iknus.ac.id²⁾

Administrasi Publik, Institut Kemandirian Nusantara¹⁾²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program reintegrasi sosial telah dilaksanakan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti pelatihan kerja, pembinaan mental dan spiritual, serta program asimilasi dan integrasi. Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah petugas pembina yang belum memadai, stigma negatif masyarakat, serta lemahnya dukungan pasca-pembebasan. Faktor pendukung program meliputi komitmen petugas pemasyarakatan, partisipasi narapidana, serta dukungan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas program reintegrasi sosial memerlukan penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta, peningkatan kualitas pembinaan, serta kebijakan pendukung yang berkelanjutan.

Kata kunci: efektivitas program, reintegrasi sosial, narapidana, residivisme, lembaga pemasyarakatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of social reintegration programs for inmates at the Class IIA Bogor Correctional Institution and to identify the factors that support and hinder their implementation. The findings reveal that social reintegration programs have been implemented through personality development and self-reliance initiatives, such as vocational training, mental and spiritual development, as well as assimilation and integration programs. However, the effectiveness of these programs has not been fully achieved due to several obstacles, including limited facilities and infrastructure, an insufficient number of correctional officers, negative social stigma, and weak post-release support. Supporting factors include the commitment of correctional officers, inmate participation, and family support. This study concludes that improving the

effectiveness of social reintegration programs requires strengthened collaboration with communities and the private sector, enhanced quality of rehabilitation programs, and sustainable supporting policies.

Keywords: program effectiveness, social reintegration, inmates, recidivism, correctional institution

PENDAHULUAN

Efektivitas program merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Menurut Robbins dan Coulter (2020), efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan target organisasi. Ukuran efektivitas tidak hanya dilihat dari output yang dihasilkan, tetapi juga dari outcome dan dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang selaras dengan tujuan strategis yang telah direncanakan. Efektivitas program memiliki dimensi yang lebih luas karena menyangkut pencapaian hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rainey (2021) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan internal lembaga dalam mencapai target administratif, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kebutuhan publik.

Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dalam sektor publik harus mempertimbangkan aspek manfaat sosial (public value) sebagai indikator keberhasilan utama. Lebih lanjut, Robbins dan Coulter (2020) menegaskan bahwa efektivitas organisasi berhubungan erat dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Sebuah program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan diperoleh melalui penggunaan sumber daya yang tepat guna dan efisien. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada kesesuaian proses pelaksanaan program dengan prinsip manajerial yang rasional dan terukur. Sementara itu, Rainey (2021) menambahkan bahwa efektivitas dalam

organisasi publik sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan adaptabilitas lembaga dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Organisasi publik harus mampu menyesuaikan programnya dengan dinamika sosial dan ekonomi agar tujuan program tetap relevan. Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, efektivitas program reintegrasi sosial tidak hanya diukur dari keberhasilan pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mengembalikan narapidana ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak kembali melakukan tindak pidana (residivis). Dengan demikian, efektivitas program dapat disimpulkan sebagai kemampuan lembaga dalam melaksanakan kegiatan secara tepat guna, efisien, dan berdampak positif terhadap penerima manfaat. Dalam penelitian ini, efektivitas program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor diukur dari ketercapaian tujuan pembinaan, kesesuaian antara pelaksanaan program dan kebutuhan narapidana, serta kontribusi program terhadap penurunan angka residivisme. Reintegrasi sosial merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem pemasyarakatan modern yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata sebagai objek penghukuman. Paradigma ini menekankan bahwa proses pemasyarakatan harus diarahkan pada pemulihan kemampuan sosial, moral, dan ekonomi narapidana agar mereka dapat kembali berperan secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, tingginya angka residivisme yang masih ditemukan di berbagai lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa proses pembinaan dan reintegrasi sosial belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dengan realitas implementasi program di lapangan.

Efektivitas program juga berhubungan erat dengan keberhasilan suatu organisasi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Mahsun (2006), efektivitas menggambarkan seberapa jauh suatu

kebijakan atau program dapat memberikan dampak positif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan sebuah program tidak hanya dinilai dari sisi internal pelaksanaannya, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan perubahan signifikan bagi para penerima manfaat. Perspektif ini mempertegas bahwa efektivitas harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya sebatas pencapaian target administratif, tetapi juga mencakup dimensi manfaat sosial, ekonomi, maupun psikologis bagi masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas program sering diukur dengan menggunakan indikator output maupun outcome.

Output mengacu pada hasil langsung yang dicapai dari suatu kegiatan, seperti jumlah peserta program atau layanan yang diberikan. Sementara itu, outcome lebih menekankan pada dampak jangka panjang yang dirasakan oleh penerima manfaat, misalnya perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, atau kualitas hidup yang lebih baik (Dunn, 2003). Kedua indikator ini penting untuk dilihat secara bersamaan karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kualitas dampak yang dihasilkan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam bidang pemasyarakatan, efektivitas program reintegrasi sosial menjadi salah satu isu penting yang banyak dibahas. Program reintegrasi sosial dirancang untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Efektivitas program ini dapat dilihat dari sejauh mana narapidana berhasil memulihkan diri, memperoleh keterampilan, serta mampu menjalankan peran sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Menurut Nugroho (2014), efektivitas reintegrasi sosial dapat tercapai apabila program pembinaan benar-benar membantu narapidana menghindari pengulangan tindak pidana atau residivisme. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan program pemasyarakatan tidak hanya diukur dari kegiatan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga,

tetapi juga dari keberhasilan narapidana menjalani kehidupan normal di luar lembaga. Keberhasilan program reintegrasi sosial juga erat kaitannya dengan dukungan lingkungan sosial. Menurut Weiss (1998), efektivitas program sosial sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi yang konstruktif antara penerima manfaat dengan lingkungannya. Dalam hal ini, narapidana yang kembali ke masyarakat memerlukan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas agar dapat menjalani kehidupan baru tanpa stigma negatif. Oleh karena itu, efektivitas program reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada kesiapan individu narapidana, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat yang akan menjadi tempat mereka beradaptasi kembali. Selain itu, evaluasi efektivitas program pemasyarakatan juga dapat menggunakan pendekatan multidimensional. Robbin dan Coulter (2012) menekankan bahwa efektivitas dapat diukur melalui berbagai dimensi, seperti produktivitas, kepuasan penerima manfaat, kualitas hasil, dan kemampuan adaptasi. Penerapan dimensi-dimensi tersebut dalam program reintegrasi sosial akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan program. Misalnya, produktivitas dapat diukur melalui jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan keterampilan, sementara outcome dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mereka dalam memperoleh pekerjaan setelah bebas. Dengan demikian, pengukuran efektivitas program perlu memperhatikan indikator yang relevan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam perspektif manajemen kinerja, efektivitas program sering dikaitkan dengan efisiensi.

Meskipun keduanya saling berhubungan, efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya. Menurut Drucker (1993), efektivitas adalah melakukan hal yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan cara yang benar (*doing things right*). Efektivitas berarti memastikan bahwa kegiatan pembinaan benar-benar membantu narapidana menjadi pribadi yang lebih baik, sementara

efisiensi menekankan agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dengan kombinasi keduanya, program dapat memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang relatif terjangkau. Dalam ranah akademik, pembahasan efektivitas program juga banyak dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Teori ini relevan untuk menilai efektivitas program reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan karena pelaksanaannya melibatkan banyak faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, ketersediaan fasilitas, kualitas petugas, hingga kondisi sosial masyarakat. Semakin baik koordinasi dan dukungan dari berbagai faktor tersebut, semakin tinggi efektivitas program yang dihasilkan.

Tingginya tingkat residivisme tidak hanya mencerminkan keterbatasan narapidana dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam desain dan pelaksanaan program reintegrasi sosial. Faktor-faktor seperti keterbatasan keterampilan kerja, lemahnya kesiapan mental dan psikologis, minimnya dukungan keluarga, serta stigma negatif dari masyarakat sering kali menjadi hambatan utama bagi mantan narapidana setelah bebas. Narapidana yang kembali ke masyarakat memerlukan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas agar dapat menjalani kehidupan baru tanpa stigma negatif. Oleh karena itu, efektivitas program reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada kesiapan individu narapidana, tetapi juga dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat yang akan menjadi tempat mereka beradaptasi kembali. Selain itu, evaluasi efektivitas program pemasyarakatan juga dapat menggunakan pendekatan multidimensional. Robbin dan Coulter (2012) menekankan bahwa efektivitas dapat diukur melalui berbagai dimensi, seperti produktivitas, kepuasan penerima manfaat, kualitas hasil, dan

kemampuan adaptasi. Penerapan dimensi- dimensi tersebut dalam program reintegrasi sosial akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keberhasilan program. Misalnya, produktivitas dapat diukur melalui jumlah narapidana yang mengikuti pelatihan keterampilan, sementara outcome dapat dilihat dari tingkat keberhasilan mereka dalam memperoleh pekerjaan setelah bebas. Dengan demikian, pengukuran efektivitas program perlu memperhatikan indikator yang relevan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam perspektif manajemen kinerja, efektivitas program sering dikaitkan dengan efisiensi.

Meskipun keduanya saling berhubungan, efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya. Menurut Drucker (1993), efektivitas adalah melakukan hal yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan cara yang benar (*doing things right*). Efektivitas berarti memastikan bahwa kegiatan pembinaan benar-benar membantu narapidana menjadi pribadi yang lebih baik, sementara efisiensi menekankan agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dengan kombinasi keduanya, program dapat memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang relatif terjangkau. Dalam ranah akademik, pembahasan efektivitas program juga banyak dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Teori ini relevan untuk menilai efektivitas program reintegrasi sosial di lembaga pemasyarakatan karena pelaksanaannya melibatkan banyak faktor, mulai dari kebijakan pemerintah, ketersediaan fasilitas, kualitas petugas, hingga kondisi sosial masyarakat. Semakin baik koordinasi dan dukungan dari berbagai faktor tersebut, semakin tinggi efektivitas program yang dihasilkan.

Tingginya tingkat residivisme tidak hanya mencerminkan keterbatasan narapidana dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam desain dan pelaksanaan program reintegrasi sosial. Faktor-faktor seperti keterbatasan keterampilan kerja, lemahnya kesiapan mental dan psikologis, minimnya dukungan keluarga, serta stigma negatif dari masyarakat sering kali menjadi hambatan utama bagi mantan narapidana setelah bebas.

Tanpa dukungan lingkungan sosial, program pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan berpotensi tidak memberikan dampak jangka panjang. Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, reintegrasi sosial memiliki landasan hukum yang kuat, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

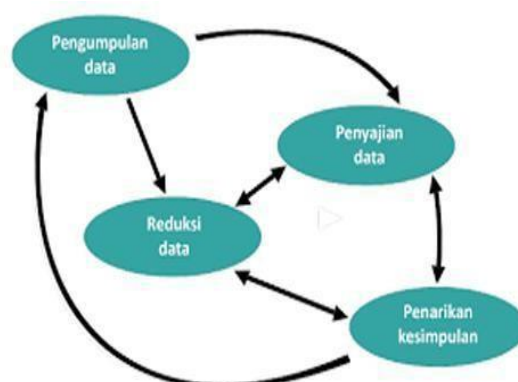
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor. Informan penelitian terdiri dari petugas pemasyarakatan dan narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial yang kompleks, yakni efektivitas program reintegrasi sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, dari perspektif para pelaku dan pihak yang terlibat.

Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data (Creswell & Poth, 2018).

Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai pelaksanaan program reintegrasi sosial, peran petugas pemasyarakatan, dukungan keluarga dan masyarakat, serta faktor faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program tersebut. Bogdan dan Biklen (2007) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendokumentasikan secara rinci interaksi, pandangan, serta praktik dalam konteks sosial tertentu (Bogdan & Biklen, 2007). Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses reintegrasi sosial di lapas.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Lapas Kelas IIA Bogor merupakan salah satu lapas yang aktif menyelenggarakan program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana, baik berupa pelatihan keterampilan, bimbingan kerohanian, maupun kegiatan sosial (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023). Kedua, lokasi ini relevan dengan tujuan penelitian untuk menggali efektivitas pelaksanaan program reintegrasi sosial secara mendalam, karena program program yang ada di lapas ini telah berjalan cukup lama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas, narapidana, dan masyarakat. Selain itu, Lapas Kelas IIA Bogor memiliki jumlah penghuni yang cukup tinggi dibandingkan kapasitas yang tersedia, sehingga kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembinaan dan reintegrasi sosial.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang dirancang untuk mendukung kesiapan narapidana dalam menghadapi kehidupan pasca-pembebasan. Pelaksanaan program ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang saling melengkapi dalam membentuk kesiapan mental, sosial, dan ekonomi narapidana. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, konseling, serta pembinaan mental dan moral yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri, tanggung jawab, dan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Kegiatan tersebut dipandang penting karena berperan dalam memperkuat kesiapan psikologis narapidana serta membantu mereka mengelola emosi dan tekanan sosial yang mungkin dihadapi setelah bebas.

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria utama dalam penelitian ini adalah keterlibatan langsung informan dengan program reintegrasi sosial di Lapas Kelas IIA Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga kelompok utama informan:

1. Petugas Pemasyarakatan (Bagian Pembinaan dan Reintegrasi Sosial) Petugas pemasyarakatan yang bekerja di bidang pembinaan dan reintegrasi sosial dipilih sebagai informan karena mereka merupakan pelaksana utama kebijakan dan strategi pemasyarakatan. Mereka memiliki peran penting dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program rehabilitasi

dan reintegrasi sosial narapidana. Melalui wawancara dengan petugas, peneliti dapat memahami bagaimana program dijalankan, kendala yang dihadapi, serta sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022).

2. Narapidana (Peserta Program Pembinaan dan Mendekati Masa Bebas) Narapidana yang sedang mengikuti program pembinaan dan mendekati masa bebas dipilih karena mereka merupakan subjek utama dari pelaksanaan program reintegrasi sosial. Informasi dari narapidana memungkinkan peneliti memahami pengalaman langsung mereka dalam mengikuti pelatihan, pembinaan, serta persiapan kembali ke masyarakat. Selain itu, perspektif narapidana sangat penting untuk menilai sejauh mana program yang diberikan benar-benar mendukung kesiapan psikologis, sosial, maupun keterampilan kerja untuk menghadapi kehidupan setelah bebas (Febriana, 2021).
3. Mantan Narapidana (Ex-Warga Binaan) Mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat menjadi informan kunci untuk mengetahui efektivitas program reintegrasi sosial dalam praktik nyata. Melalui pengalaman mereka, peneliti dapat menilai sejauh mana program yang diikuti di Lapas Kelas IIA Bogor membantu proses adaptasi sosial, penerimaan masyarakat, serta kemandirian ekonomi setelah bebas. Informasi ini juga penting untuk mengidentifikasi kendala yang masih mereka hadapi, seperti stigma sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, maupun kurangnya dukungan keluarga (Suryani & Fadilah, 2022).

Sementara itu, pembinaan kemandirian diwujudkan melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan potensi dan minat narapidana, seperti menjahit, tata boga, dan kerajinan tangan. Program pelatihan ini bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan sebagai modal untuk

memperoleh pekerjaan atau membuka usaha mandiri setelah kembali ke masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian narapidana menyatakan bahwa keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan cukup membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri serta harapan untuk hidup mandiri secara ekonomi. Program asimilasi dan integrasi juga menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial, di mana narapidana diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara bertahap dengan masyarakat. Meskipun demikian, tidak semua narapidana memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti program tersebut karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor menunjukkan adanya upaya nyata dari pihak lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pembinaan narapidana sesuai dengan prinsip sistem pemasyarakatan. Berbagai program pembinaan telah dirancang dan dilaksanakan sebagai bentuk implementasi kebijakan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika ditinjau dari pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*), pelaksanaan program ini pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun bentuk kegiatan pembinaan yang diselenggarakan.

Namun demikian, meskipun program telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam menekan angka residivisme. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian pelaksanaan dengan aturan formal, tetapi juga oleh kualitas dan keberlanjutan pembinaan yang diterima narapidana. Tingginya angka residivisme mengindikasikan bahwa sebagian narapidana masih mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai dan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan ketika

kembali ke lingkungan sosialnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif program reintegrasi sosial dengan realitas hasil yang dicapai di lapangan. Secara normatif, program reintegrasi sosial dirancang sebagai sarana untuk membekali narapidana agar mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara wajar setelah bebas, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari masyarakat. Namun, dalam implementasinya, tujuan ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga program reintegrasi sosial masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial adalah faktor eksternal yang berada di luar lingkungan lembaga pemasyarakatan. Stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana masih menjadi hambatan besar, karena sering kali mereka dipandang sebagai individu yang berpotensi mengulangi tindak pidana. Selain itu, keterbatasan kesempatan kerja juga mempersempit ruang bagi mantan narapidana untuk mencapai kemandirian ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya proses penyesuaian sosial. Lemahnya dukungan pasca-pembebasan, baik dari keluarga, masyarakat.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama lima bulan, yaitu mulai dari bulan Juli hingga Desember 2025. Kegiatan penelitian diawali dengan tahap persiapan, yang meliputi penyusunan proposal, pengurusan izin penelitian, dan penentuan informan. Selanjutnya, pada bulan Agustus hingga September 2025 dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor. Tahap berikutnya adalah analisis data yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2025, diikuti dengan penyusunan laporan hasil penelitian dan revisi akhir skripsi pada bulan Desember 2025. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan penelitian diharapkan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pembinaan dan pejabat

struktural di Lapas Kelas IIA Bogor, tujuan program pembinaan telah dirumuskan secara jelas dan mengacu pada sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, menaati aturan, serta memiliki bekal keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Tujuan tersebut tidak hanya dipahami oleh petugas, tetapi juga disosialisasikan kepada narapidana sejak awal masa pidana. Hasil wawancara dengan narapidana menunjukkan bahwa mereka memahami arah pembinaan sebagai upaya perubahan diri dan persiapan reintegrasi sosial. Kejelasan tujuan ini sejalan dengan pandangan Robbins dan Coulter (2020) yang menegaskan bahwa kejelasan tujuan merupakan prasyarat utama efektivitas suatu program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan telah mencapai sebagian besar target yang direncanakan, khususnya dalam pembentukan disiplin dan partisipasi narapidana dalam kegiatan pembinaan. Petugas menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib dan keterlibatan narapidana dalam kegiatan pembinaan menunjukkan peningkatan. Narapidana juga mengakui adanya perubahan positif, meskipun hasil pembinaan belum sepenuhnya merata karena perbedaan motivasi dan kesungguhan individu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program bersifat bertahap dan dipengaruhi oleh karakteristik sasaran pembinaan, sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Coulter (2020) dalam konsep efektivitas organisasi. Secara umum, tujuan lembaga pemasyarakatan dalam membina dan memperbaiki perilaku narapidana telah mulai tercapai. Petugas menilai bahwa narapidana menunjukkan sikap yang lebih tertib, disiplin, dan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dibandingkan sebelum mengikuti pembinaan. Hal ini juga dirasakan oleh narapidana yang mengungkapkan adanya perubahan sikap dan cara pandang terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Temuan ini sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan yang menekankan perubahan perilaku sebagai proses berkelanjutan (Sudrajat, 2021).

Hambatan utama dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, jumlah petugas pembina yang belum sebanding dengan jumlah narapidana, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Keterbatasan fasilitas pembinaan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pelatihan dan pembekalan keterampilan, sehingga tidak seluruh narapidana dapat memperoleh pembinaan secara maksimal. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas pembina menyebabkan intensitas pendampingan dan pengawasan terhadap narapidana menjadi kurang efektif, baik selama proses pembinaan maupun dalam tahap persiapan menjelang bebas.

Stigma negatif yang melekat pada mantan narapidana juga menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial. Pandangan masyarakat yang cenderung diskriminatif menyebabkan mantan narapidana merasa cemas dan tidak percaya diri dalam menghadapi kehidupan pasca-pembebasan. Kondisi ini berdampak pada sulitnya memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, sehingga berpotensi menghambat proses adaptasi dan meningkatkan risiko marginalisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pembinaan dan pejabat struktural di Lapas Kelas IIA Bogor, tujuan program pembinaan telah dirumuskan secara jelas dan mengacu pada sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, menaati aturan, serta memiliki bekal keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Tujuan tersebut tidak hanya dipahami oleh petugas, tetapi juga disosialisasikan kepada narapidana sejak awal masa pidana.

Hasil wawancara dengan narapidana menunjukkan bahwa mereka memahami arah pembinaan sebagai upaya perubahan diri dan persiapan reintegrasi sosial. Kejelasan tujuan ini sejalan dengan pandangan Robbins dan Coulter (2020) yang menegaskan bahwa kejelasan tujuan merupakan prasyarat utama efektivitas suatu program. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelaksanaan program pembinaan telah mencapai sebagian besar target yang direncanakan, khususnya dalam pembentukan disiplin dan partisipasi narapidana dalam kegiatan pembinaan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana merasa cukup puas terhadap program pembinaan yang dijalani, khususnya pembinaan kepribadian dan keagamaan. Kepuasan tersebut juga diakui oleh petugas sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan. Namun demikian, narapidana berharap adanya pengembangan jenis pembinaan keterampilan agar lebih relevan dengan kebutuhan kerja setelah bebas. Temuan ini sejalan dengan Febriana (2021) yang menyatakan bahwa kepuasan warga binaan mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Dukungan keluarga merupakan bagian penting dari kepentingan pemangku kepentingan. Petugas dan narapidana sepakat bahwa dukungan keluarga, seperti kunjungan dan komunikasi, memberikan motivasi bagi narapidana untuk mengikuti pembinaan dengan lebih baik. Dukungan masyarakat dinilai masih terbatas, namun keberadaan pihak eksternal seperti relawan dan lembaga sosial telah memberikan kontribusi positif.

Hal ini sejalan dengan Putri (2019) dan Aini dan Nugroho (2021) yang menekankan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam mendukung kesiapan reintegrasi sosial mantan narapidana. Kinerja petugas pembinaan dinilai cukup baik oleh narapidana maupun pejabat struktural. Petugas dianggap profesional, humanis, dan berupaya memberikan pelayanan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat keterbatasan jumlah petugas, pelayanan pembinaan tetap berjalan. Temuan ini sejalan dengan Nurhadi (2019) yang menekankan prinsip humanisme dalam pembinaan narapidana sebagai bagian dari efektivitas sistem pemasyarakatan. Petugas menyampaikan bahwa kepatuhan terhadap tata tertib dan keterlibatan narapidana dalam kegiatan pembinaan menunjukkan peningkatan. Narapidana juga

mengakui adanya perubahan positif, meskipun hasil pembinaan belum sepenuhnya merata karena perbedaan motivasi dan kesungguhan individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program bersifat bertahap dan dipengaruhi oleh karakteristik sasaran pembinaan, sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Coulter (2020) dalam konsep efektivitas organisasi. Secara umum, tujuan lembaga pemasyarakatan dalam membina dan memperbaiki perilaku narapidana telah mulai tercapai. Petugas menilai bahwa narapidana menunjukkan sikap yang lebih tertib, disiplin, dan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dibandingkan sebelum mengikuti pembinaan. Hal ini juga dirasakan oleh narapidana yang mengungkapkan adanya perubahan sikap dan cara pandang terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Temuan ini sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan yang menekankan perubahan perilaku sebagai proses berkelanjutan (Sudrajat, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program reintegrasi sosial bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bogor pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan. Berbagai bentuk pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, telah dijalankan sebagai upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam mencapai tujuan utama reintegrasi sosial, yaitu menekan angka residivisme dan memulihkan fungsi sosial narapidana secara berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial meliputi peran dan komitmen petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan, tingkat partisipasi narapidana dalam mengikuti berbagai program yang disediakan, serta dukungan keluarga yang berperan penting dalam memberikan motivasi dan penerimaan sosial bagi narapidana. Dukungan tersebut terbukti

membantu narapidana dalam membangun kepercayaan diri dan kesiapan mental untuk menjalani kehidupan pasca-pembebasan. Sebaliknya, terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas program, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, jumlah dan kompetensi petugas pembina yang belum memadai, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana, serta lemahnya sistem pendampingan dan dukungan pasca pembebasan.

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial di Lapas Kelas IIA Bogor meliputi perubahan perilaku dan sikap narapidana, peningkatan keterampilan kerja sebagai bekal kemandirian, serta dukungan keluarga yang memberikan motivasi dan kesiapan psikologis menjelang pembebasan. Pembinaan kepribadian, keagamaan, dan kemandirian terbukti berkontribusi positif terhadap kesiapan narapidana untuk kembali berfungsi secara sosial di masyarakat. Namun demikian, program reintegrasi sosial masih menghadapi beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan pendampingan pasca-pembebasan, terbatasnya akses terhadap pekerjaan dan layanan sosial, serta stigma sosial dan rendahnya penerimaan sebagian masyarakat terhadap mantan narapidana. Faktor-faktor tersebut menyebabkan proses reintegrasi belum sepenuhnya optimal dan menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya ditentukan oleh kesiapan individu narapidana, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan struktural dan kesiapan lingkungan sosial.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program reintegrasi sosial di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan sarana dan prasarana pembinaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masyarakat, serta perluasan kerja sama dengan masyarakat, lembaga sosial, dan sektor swasta dalam menyediakan akses pekerjaan dan pendampingan bagi mantan narapidana. Dengan adanya sinergi antara lembaga masyarakat dan lingkungan sosial, program reintegrasi sosial diharapkan tidak hanya mampu menekan angka residivisme, tetapi juga mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang produktif, mandiri, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, Nugroho, F. (2021). Peran dukungan sosial dan kepercayaan diri

terhadap kesiapan reintegrasi sosial mantan narapidana. Jurnal Psikologi dan Konseling, 18(2), 112–124.
<https://doi.org/10.24036/jpk/vol18iss2/112>

Andani, N., Yusnita, D., & Wijaya, R. (2024). Hak narapidana atas pembinaan dalam perspektif yuridis normatif dan empiris. Jurnal Senandika, 4(1), 12–25.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/49662>

Andani, S. Y., Arbisen, J., & Wijanarko, T. G. (2025). Efektivitas pelaksanaan hak narapidana atas pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan. PROSIDING SENANTIAS, 6(2), 35–39.

Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct (5th ed.). Matthew Bender.

Antara Babel. (2022, September 27). Jumlah residivis di Bangka Belitung sangat rendah. Antara News.
<https://babel.antaranews.com/>

Antara Jabar. (2024, Agustus 17). Lapas Kelas IIA Bogor tampung 705 orang narapidana dan tahanan. Antara News. <https://jabar.antaranews.com/>

Arfan, M., Nurhidayah, R., & Rachman, A. (2022). Efektivitas program keterampilan kerja dalam reintegrasi sosial narapidana di Lapas Kelas I Makassar. Jurnal Pemasyarakatan
<https://doi.org/10.31289/jpi.v6i2.8765> Indonesia, 6(2), 77–89.

Arief, B. N. (2020). Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum pidana. Prenada Media.

Arifin, Z. (2021). Tantangan implementasi program rehabilitasi narapidana di Indonesia. Jurnal Pemasyarakatan Indonesia, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.33541/jpi.v5i2.3211>

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2020). Laporan Tahunan Deradikalisasi. BNPT.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (5th ed.). Pearson Education.

Clear, T. R., Reisig, M. D., & Cole, G. F. (2018). American corrections (12th ed.). Cengage Learning.